

Ketimpangan Antardaerah, Desentralisasi dan Eksistensi Korupsi di Indonesia

Interregional Inequality, Decentralization, and Corruption in Indonesia

I Wayan Sukadana*

*Laboratorium Ilmu Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*

Abstract. Decentralization has been implemented for eight years. However, corruption has not been lessened yet within the decentralization era. Bad regulations and investment climate are suspected to be a cause of the situations. Good regulation and investment climate appear if the interjurisdictional competitions exist. The incentive for competition is the equality of economic endowment among regions, or each region has their own tradeable "technology" that comparable to others. Inequality in "technology" implies that the region with rich "technology" is more attractive eventhough there are bad regulation and the investment climate. In contrary, in region with less "technology", corruption will appear because of weak control of the society to the bureaucracy. The strong assumption of this paper is short memories of voters. This paper attempts to estimate and to model the relation between economic variable and corruption. The estimation uses the cross section data among kabupaten/kota in Indonesia in 2004. The estimation shows that economic endowment variable positively and significant correlated to the investment level. On the other hand, the effect of corruption is statistically insignificant in explaining the investment level. The subsequent part of this paper attempts to estimate and to model how the heterogeneity or inequality in "technology" affects the existence of corruption in Indonesia. The OLS regression of heterogeneity of domestic product (PDRB) against corruption index shows that the heterogeneity positively correlated with corruption level.

Key words: corruption, inter-jurisdiction competition, inequality, asymmetry in information

JEL classification: D21, D73, H73

PENDAHULUAN

Isu penting dalam era reformasi adalah bagaimana pemerataan kesejahteraan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan data BPS dari tahun 2003 sampai dengan 2007, wilayah barat Indonesia (Sumatera dan Jawa) masih menguasai distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDB. Sumatera bergerak pada kisaran 22 persen dari PDB yaitu 22,40 persen pada tahun 2003 dan 22,98 persen pada 2007. Sedangkan Jawa bergerak pada kisaran 59 persen yaitu 59,90 persen tahun 2003 dan 59 persen pada 2007. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan adalah dengan desentralisasi. Melalui desentralisasi diharapkan masing-masing daerah mampu untuk mengelola potensinya sendiri untuk kesejahteraan daerah tersebut. Desentralisasi di Indonesia telah berjalan selama hampir delapan tahun sejak UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

* alamat korespondensi: Gedung Departemen Ilmu Ekonomi Lantai 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424. Email: wayan.sukadana@gmail.com.

Desentralisasi juga diharapkan mampu untuk menekan korupsi. Henderson dan Kuncoro (2004) menyatakan "gangguan" oleh pemerintah daerah terhadap para pengusaha yang menyebabkan -pengusaha akan memberikan "uang pelicin"- dapat ditekan dengan adanya persaingan antardaerah dalam memberlakukan regulasinya masing-masing. Pengusaha atau investor akan lebih tertarik melakukan investasi pada daerah yang regulasinya lebih mudah, sehingga tidak membebani biaya perusahaan. Persaingan dalam regulasi antardaerah ini merupakan hal penting dalam usaha menurunkan tingkat korupsi. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2007 indeks korupsi di Indonesia menurut *Transparency International*, cenderung mengalami peringkatan. Pada tahun 2000 indeks korupsi di Indonesia adalah 1,7¹ dan meningkat menjadi 2,3 pada tahun 2007. Terjadinya penurunan tingkat korupsi ini masih belum signifikan karena Indonesia masih berada pada golongan negara-negara paling korup². Sebagaimana banyak tulisan telah menyatakan, korupsi berdampak negatif terhadap kesejahteraan. Mauro (1995) menyatakan korupsi akan menyebabkan rendahnya investasi yang kemudian akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kaufmann (2006) juga menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap variabel-variabel kesejahteraan seperti pendapatan, dan tingkat kematian bayi.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana menciptakan iklim persaingan antardaerah yang benar-benar kompetitif sehingga usaha untuk menekan korupsi dapat tercapai. Berdasarkan data *Transparency International* Indonesia pada tahun 2006 indeks korupsi di 32 kota di Indonesia masih sangat rendah yaitu terendah 3,2 di Maumere dan tertinggi 6,6 di Palangkaraya. Kota-kota besar di Sumatera juga masih memperlihatkan nilai indeks yang rendah yaitu Medan 4,7, Pekanbaru 4,4, Batam 4,5 dan Padang 5,4. Sedangkan kota-kota di Jawa juga mengalami hal yang sama yaitu DKI Jakarta 4,0, Tangerang 4,5, Bekasi 4,3, Semarang 5,3, Jogjakarta 5,6, dan Surabaya 4,4.

Secara alami Indonesia memiliki kekayaan alam yang merata, akan tetapi kepemilikan "teknologi" (infrastruktur, modal dan sumber daya manusia) masih sangat timpang. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi baik oleh PMA atau PMDN masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat (Sumatera dan Jawa). Menurut data BKPM pada tahun 2006 jumlah izin usaha tetap untuk PMA yang dikeluarkan untuk wilayah Sumatera adalah 42 buah dengan nilai realisasi USD898,2 juta. Sedangkan untuk wilayah Jawa pada tahun 2006 jumlah izin usaha tetap untuk PMA yang dikeluarkan adalah sebanyak 718 buah dengan nilai realisasi USD4.416,4 juta. Nilai ini sangat jauh bila dibandingkan dengan daerah Indonesia Timur.

Data jumlah izin usaha tetap untuk PMA di Bali dan Nusa Tenggara memang cukup banyak yaitu 82 buah -lebih banyak dibandingkan wilayah Sumatera- akan tetapi nilai realisasinya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa yaitu sebesar USD106,2 juta. Daerah yang paling sedikit mengeluarkan izin usaha tetap untuk PMA adalah Maluku dan Papua yang masing-masing mengeluarkan satu buah izin usaha dengan nilai masing-masing USD20,0 juta dan USD0,6 juta. Meskipun korupsi masih tinggi di daerah Indonesia bagian barat,

¹ Nilai indeks adalah antara 0 dan 10, dengan nilai mendekati 0 adalah negara dengan korupsi tinggi dan mendekati 10 adalah negara bersih dari korupsi.

² Tahun 2006 Indonesia berada pada urutan 130 dari 163, bersama-sama dengan Azerbaijan, Burundi, Central African Rep., Ethiopia, Papua New Guinea, Togo, dan Zimbabwe. Tahun 2007 Indonesia berada pada urutan 143 dari 179 bersama Gambia, Togo dan Rusia. Indonesia juga menjadi negara terkorup ketiga di Asia Tenggara setelah Myanmar dan Cambodia yang berada pada peringkat 160 dan 152 dunia, dengan indeks korupsi masing-masing 1,9 dan 2,1.

hal ini tidaklah mengurangi laju investasi di daerah ini. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu, pertama karena investor memiliki harapan pendapatan yang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya -termasuk biaya "gangguan"- . Kedua, di wilayah lain di Indonesia tingkat korupsi juga masih tinggi.

Dalam hubungan korupsi dengan desentralisasi, terdapat beberapa pendapat mengenai dampak desentralisasi terhadap eksistensi korupsi. Di satu pihak desentralisasi merupakan jalan untuk menekan terjadinya korupsi. Fisman dan Gatti (2002) menyatakan korupsi ditemukan lebih rendah di negara yang melakukan desentralisasi pada pengeluaran pemerintahnya. Di lain pihak juga terdapat pendapat yang menyatakan desentralisasi menyebabkan meningkatnya korupsi di daerah. Prud'homme (1995) menyatakan birokrat di daerah kurang mendapatkan pengawasan dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat lebih mendapatkan pengawasan karena pusat media, LSM, para pengamat atau para ahli lebih banyak memusatkan kegiatan dan berkantor di ibu kota negara.

Pemerintah yang memiliki pengawasan yang lemah terhadap para birokratnya di daerah akan menyebabkan korupsi yang lebih tinggi di daerah seperti yang diungkapkan Shleifer dan Vishny (1993). Birokrat daerah lebih leluasa melakukan tindakannya karena biasanya para birokrat daerah ini adalah "putra daerah" yang tentunya sudah mengenal seluk beluk daerah dan masyarakatnya. Hal ini akan menjadi semakin parah apabila masyarakat di daerah (yang rata-rata miskin) kurang melakukan pengawasan karena terlalu sibuk dalam mengejar materi untuk memperbaiki kesejahteraannya, serta ditambah dengan pendeknya ingatan masyarakat terhadap "dosa-dosa" para birokrat. Dalam kondisi pengawasan yang terbatas tersebut eksistensi dari korupsi sangat tergantung dari perilaku para birokrat.

Penurunan tingkat korupsi di Indonesia selama kurun waktu 2000-2006 diduga adalah sebagai akibat adanya penegakan hukum dan perubahan kepemimpinan nasional. Korupsi adalah masalah pada perilaku para agen dalam perekonomian. Setiap agen dalam perekonomian akan tanggap terhadap adanya insentif dan akan merespon adanya insentif tersebut secara positif atau negatif. Levitt dan Dubner (2006) menyatakan bila agen dipaksa menghilangkan perilaku korup dengan menggunakan hukum, maka agen tersebut akan berusaha untuk mencari celah menghindari hukum tersebut, sehingga perilaku korup tersebut tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah wujud. Cara untuk merubah perilaku korup tersebut adalah dengan memberikan insentif agar perilaku tersebut hilang dengan sendirinya tanpa dipaksa. Dalam kaitan dengan desentralisasi dan korupsi di Indonesia insentif yang perlu dibangun adalah menyeimbangkan potensi antarkabupaten atau kota agar terjamin adanya iklim kompetisi antardaerah.

Permasalahan yang dibahas didalam tulisan ini adalah: Apakah potensi daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi investasi pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2000-2006? Bagaimanakah pengaruh keragaman potensi daerah mempengaruhi eksistensi korupsi di Indonesia tahun 2000-2006? Seberapa signifikankah pengaruh "gangguan" terhadap investor mempengaruhi investasi di daerah? Pada bagian 2 tulisan ini akan dibahas mengenai model dan kerangka pikir tentang pengaruh potensi daerah untuk menarik investasi. Kemudian akan dibahas juga bagaimana ketidakseimbangan potensi antardaerah dapat menyebabkan korupsi tetap ada di Indonesia. Bagian 3 akan menjelaskan tentang data dan metodologi untuk mendukung model dan kerangka pikir teoretis. Bagian 4 akan membahas tentang hasil estimasi

secara ekonometrika mengenai permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini dan terakhir yaitu bagian 5 adalah kesimpulan.

MODEL

Pada bagian ini akan dibuat model sederhana bagaimana potensi antardaerah akan menjadi insentif bagi para pengusaha/investor untuk menanamkan investasinya. Seperti yang diungkapkan Henderson dan Kuncoro (2004), persaingan antardaerah dalam menarik investor akan menekan tingkat "gangguan" terhadap para pengusaha/investor. Kemudian pada bagian berikutnya akan dibuat model bagaimana dampak dari keragaman potensi daerah akan menyebabkan korupsi tetap eksis.

Model Insentif Potensi Daerah

Sebelum menjalankan suatu usaha, setiap pengusaha akan memperhitungkan penerimaan yang akan diperoleh dan biaya yang akan dikeluarkannya dalam menjalankan usahanya tersebut. Penerimaan akan dipengaruhi oleh harga output dan fungsi produksi, sedangkan biaya ditentukan oleh harga input. Diasumsikan industri adalah *price taker* untuk pasar output dan input. Sehingga fungsi produksi menjadi faktor utama yang menentukan penerimaan perusahaan. Untuk biaya, mengikuti Henderson dan Kuncoro (2004) biaya perusahaan akan ditentukan oleh biaya dari "gangguan" yang dilakukan oleh birokrat dalam mengurus ijin usaha, memperbaharui atau memperpanjang ijin usaha, beserta dengan waktu yang dihabiskan untuk melakukan pengurusannya.

Diasumsikan terdapat jumlah tenaga kerja L_i dan L_j dengan jumlah yang tetap untuk masing-masing daerah dan tersebar di tiap-tiap perusahaan. Perusahaan diasumsikan tetap secara nasional yaitu \bar{N} yang tersebar di masing-masing daerah N_i dan N_j yang dapat berpindah antardaerah sehingga $N_i + N_j = \bar{N}$. Teknologi A tersedia pada tiap-tiap daerah dan dapat digunakan oleh semua perusahaan di daerah masing-masing secara bersama-sama. Penerimaan perusahaan dari kegiatan produksi adalah $R_i(N_i/A_iL_i) = Pf_i(A_iL_i/N_i) - w_iA_iL_i/N_i$. Di mana $f' > 0$, $f'' < 0$, w dibayar sesuai dengan marginal produktivitasnya ($w = f'$) dan P sama dengan 1, maka dapat ditentukan³

$$dR_i/dA_i = -f''(A_iL_i/N_i)(A_iL_i/N_i) > 0 \quad (1)$$

Persamaan (1) menunjukkan bila teknologi di daerah i meningkat maka penerimaan perusahaan akan meningkat. Kemudian, dengan mengasumsikan pada awalnya teknologi di daerah i sama dengan teknologi di daerah j , sehingga $R_i = R_j$. Dengan asumsi jumlah perusahaan secara nasional tetap, $-dN_j = dN_i$ maka didapat⁴:

$$\left. \frac{dN_i}{dN_i} \right|_{A_i, \text{konstan}} = - \frac{f_i''(A_iL_i/N_i)(A_iL_i/N_i)}{-f_i''(A_i^2L_i^2/N_i^3) - f_j''(A_j^2L_j^2/N_j^3)} > 0 \quad (2)$$

Persamaan (2) menunjukkan, jika teknologi di daerah i meningkat dengan asumsi teknologi di daerah j tetap, maka perusahaan yang masuk ke daerah i akan meningkat. Oleh karena teknologi di daerah i meningkat, maka penerimaan perusahaan di daerah i juga meningkat. Hal

³ $dw_i/dA_i = f''(A_iL_i/N_i) < 0$

⁴ $dw_i/dN_i = -f''(A_iL_i/N_i^2) > 0$

ini menjadi daya tarik bagi perusahaan lain diluar daerah i untuk masuk dan bersaing memperebutkan pasar, sehingga:

$$dR_i/dN_i = f''(A_i^2 L_i^2 / N_i^3) < 0 \quad (3)$$

Dengan asumsi jumlah permintaan pasar yang tetap maka dengan meningkatnya jumlah perusahaan di daerah i , maka penerimaan perusahaan akan menurun, seperti yang ditunjukkan pada persamaan (3).

Jika kemudian ada "gangguan" dari pemerintah daerah maka keuntungan total perusahaan di daerah i adalah $\pi_i = R_i(N_i/A_i L_i) - c_i(h_i)^5$. Selanjutnya akan dibuat model tentang bagaimana teknologi yang dimiliki suatu daerah tetap menjadi insentif untuk melakukan investasi atau menjalankan usaha di daerah tersebut, meskipun "gangguan" dari pemerintah daerah mengalami peningkatan.

Dimisalkan terjadi perbedaan kepemilikan teknologi antardaerah, $A_i > A_j$ sehingga $R_i > R_j$. Diasumsikan juga pada awalnya "gangguan" di daerah i sama dengan daerah j ($h_i = h_j$), sehingga $\pi_i > \pi_j$. Selanjutnya dapat didefinisikan:

$$\pi_i - \pi_j = \varepsilon_i(A_i L_i / N_i) \quad (4)$$

$\varepsilon_i(A_i L_i / N_i)$ adalah keunggulan produksi yang dimiliki oleh daerah i sebagai akibat dari keunggulan teknologi yang dimiliki. Total diferensialkan persamaan (4) dengan asumsi $dA_i = dA_j = dh_j = 0$ dan $-dN_i = dN_j$ maka didapat⁶:

$$\frac{dN_i}{dh_i} \Big|_{h_j, \text{konstan}} = \frac{-c_i'}{-(R_i'/A_i L_i + R_j'/A_j L_j) - \varepsilon_i'(A_i L_i / N_i^2)} > 0 \quad (5)$$

Di mana $R' < 0$. Dalam persamaan (5) jika "gangguan" di daerah i mengalami peningkatan, perusahaan di daerah i tidak akan langsung keluar ke daerah j . Perusahaan daerah i akan mempertimbangkan tambahan potensi daerah i terhadap penerimaan di daerah i yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah j , dengan kenaikan "gangguan" dan tambahan penerimaan di daerah j bila terjadi peningkatan jumlah perusahaan di daerah j . Jadi perusahaan di daerah i tidak akan langsung pindah bila terjadi peningkatan "gangguan" di daerah i .

Persamaan (5) menunjukkan, perusahaan akan tetap tertarik untuk menjalankan usahanya di daerah tersebut meskipun tingkat "gangguan" di daerah tersebut lebih tinggi. Meningkatnya "gangguan" di suatu daerah dapat dijadikan insentif bagi beberapa perusahaan yang memiliki modal yang lebih besar untuk meningkatkan keuntungannya, karena pasar di daerah tersebut akan menjadi semakin besar dengan keluarnya beberapa perusahaan.

Untuk menurunkan tingkat "gangguan" pada suatu perekonomian maka diperlukan pemerataan potensi atau teknologi antardaerah. Jika teknologi merata di berbagai daerah maka

⁵ Dalam model ini pajak diabaikan untuk lebih menyederhanakan model. Sedangkan untuk melihat model dengan fungsi "harassment" yang lebih lengkap dapat dilihat pada Henderson dan Kuncoro (2004).

⁶ $R_i' dN_i / A_i L_i - c' dh_i - R_j' dN_j / A_j L_j = -\varepsilon_i'(A_i L_i / N_i^2) dN_i$

$\varepsilon_i(A_i L_i/N_i) = 0$ sehingga $dN_i/dh_i < 0$ dengan asumsi h_j konstan⁷. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan setiap daerah akan menurunkan tingkat "gangguan" terhadap perusahaan, untuk menarik lebih banyak perusahaan.

Model Eksistensi Korupsi

Saat iklim investasi di Indonesia mulai membaik terjadi fenomena pengusaha yang tidak pernah membayar suap sudah tidak ada lagi. Data dari Kuncoro (2004) menyatakan rata-rata suap oleh perusahaan di kota lebih tinggi dibandingkan di daerah bukan kota (kabupaten) yaitu 11,6 dan 9,7.

Selanjutnya dalam bagian ini akan dibuat model tentang bagaimana keragaman teknologi antardaerah menyebabkan korupsi tetap ada, terutama pada daerah dengan tingkat teknologi lebih tinggi, serta pentingnya kesadaran dan perubahan dalam cara berfikir masyarakat tentang perannya dalam pembangunan.

Model ini diinspirasi dari model Edgeworth-Bertrand⁸ tentang adanya *capacity constraint* yang menyebabkan perusahaan *duopoly* dapat menetapkan harga di atas biaya marginalnya tanpa kehilangan pembeli dan menikmati laba positif. Setiap daerah memungut pajak t dari pengusaha dan dipergunakan untuk memenuhi permintaan pelayan publik $G^*(t)$. Pajak yang dipungut didasarkan atas pendapatan dari kegiatan produktif (persentase dari R). Pajak merupakan beban bagi perusahaan dan sering digunakan oleh para birokrat sebagai alat untuk melakukan "gangguan". Oleh karena itu didefinisikan, *resource* yang dapat dikorup adalah Z dan pungutan yang mengandung "gangguan", $p(h, t)$, sehingga korupsi daerah i adalah:

$$Z_i = [p_i(h_i, t_i) - G_i^*(t_i)]N_i(p_i) \quad (6)$$

Jika diasumsikan dua daerah berkompetisi untuk menarik investasi maka persamaan (6) akan menjadi:

$$Z_i = [p_i(0, t_i) - G_i^*(t_i)]N_i(p_i) = Z_i = 0 \quad (7)$$

Dalam persamaan (7) pungutan terhadap perusahaan seluruhnya ditransfer sebagai pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan solusi Bertrand dan bersesuaian dengan persamaan (5) bila teknologi di kedua daerah sama ($dN_i/dh_i < 0$).

Seperti pada bagian sebelumnya, diasumsikan teknologi pada masing-masing daerah adalah $A_i > A_j$. Oleh karena $A_i > A_j$ maka $R_i > R_j$. Tiap daerah menetapkan pungutan $p(h, t)$ kepada perusahaan di wilayahnya masing-masing. Diasumsikan seluruh pajak yang diterima didistribusikan sebagai pelayanan publik. Jika birokrat di kedua daerah tidak melakukan "gangguan" maka $R_i - p_i(0, t_i) > R_j - p_j(0, t_j)$ atau $\pi_i > \pi_j$, sehingga $Z_i = Z_j = 0$. Birokrat di daerah i memiliki kesempatan untuk melakukan "gangguan" tanpa membuat perusahaan di daerah i keluar. Jika birokrat daerah i menetapkan "gangguan" sebesar h_i di mana $p_i(h_i, t_i) - p_j(0, t_j) = \varepsilon > 0$, maka R_i akan masih tetap lebih besar dibandingkan dengan R_j . Perusahaan tidak akan keluar dari daerah i , dan birokrat daerah i akan menikmati:

$$Z_i > Z_j = 0 \quad (8)$$

⁷ Hal ini seperti yang dimodelkan dalam Henderson dan Kuncoro (2004).

⁸ Untuk lebih jelas mengenai model ini dapat dilihat pada Tirole (1988) halaman 209-224.

Persamaan (8) menunjukkan korupsi akan terjadi di daerah yang memiliki teknologi lebih besar. Hal ini sesuai dengan data empiris yang menyatakan rata-rata suap yang dilakukan oleh pengusaha di daerah kota lebih tinggi dibandingkan dengan daerah bukan-kota.

Asumsi yang sangat penting yang membuat solusi persamaan (8) dapat terjadi secara berkelanjutan adalah *incomplete and asymmetry information* pada *game* antara birokrat dengan masyarakat pemilihnya. Pada masyarakat perkotaan kualitas dari para birokratnya diketahui oleh para pemilihnya, begitu juga sebaliknya (*perfect information*). Akan tetapi ada banyak hal tentang kebijakan pemerintah yang tidak dapat diketahui oleh pemilihnya (*incomplete information*). Seperti misalnya pemetapan pungutan $p_i(h_i, t_i) - p_i(0, t_j) = \varepsilon > 0$, informasi yang diperoleh pemilih hanyalah berdasarkan dengan pelayanan publik yang diberikan $G_i(t_i) = G_i^*(t_i)$. Di lain pihak para birokrat mengetahui dengan jelas permintaan akan pelayan publik para pemilihnya G_i^* (*asymmetry information*).

Kemudian timbul pertanyaan, apakah di daerah bukan-kota, atau daerah dengan teknologi lebih rendah tidak terjadi korupsi? Kenyataannya adalah: Korupsi terjadi di mana-mana, baik di kota maupun bukan-kota. Prud'homme (1995) menyatakan dengan desentralisasi pengawasan terhadap perilaku birokrat di daerah menjadi tidak terlalu ketat seperti di pusat. Pada masyarakat di daerah seringkali mereka tidak mengetahui informasi tentang kualitas para birokrat, sebaliknya para birokrat sendiri juga tidak tahu seberapa besar permintaan pelayanan publik masyarakatnya. Karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seringkali para masyarakat pemilih sendiri tidak mengetahui pelayanan publik seperti apa yang mereka butuhkan (*imperfect information*). Sehingga dalam model ini dapat diasumsikan terjadi $G_j(t_j) < G_j^*(t_j)$, atau dengan kata lain permintaan akan pelayanan publik lebih kecil dari yang seharusnya didistribusikan. Sehingga birokrat daerah j akan menikmati:

$$Z_j = p_j(0, t_j) - G_j(t_j)N_j(p_j) > 0 \quad (9)$$

Persamaan (9) menunjukkan korupsi tetap muncul di daerah dengan teknologi lebih rendah, atau daerah bukan kota. *Resource* yang dikorup adalah *resource* yang seharusnya didistribusikan sebagai pelayanan publik. Korupsi seperti inilah yang menyebabkan distorsi pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kaufmann (2006), suap yang dilakukan oleh pengusaha adalah untuk memperlancar jalannya bisnis, tidak ada nilai tambah produktif yang hilang dari perekonomian. Hal ini bersesuaian dengan solusi persamaan (8). Untuk melihat lebih jelas *cost* dari korupsi seperti pada persamaan (9), maka harus dilihat pada distorsi pendapatan masyarakat, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan variabel-variabel kesejahteraan lainnya.

DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai data-data dan metodologi yang digunakan untuk menguji kerangka pikir yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan dalam data-data empiris untuk mendukung model yang dibangun pada bagian sebelumnya. Tetapi penelitian ini akan tetap melakukan pembuktian secara empiris dengan data-data yang tersedia.

Pada bagian sebelumnya, keputusan melakukan investasi di daerah i dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan di daerah i , dan tingkat "gangguan" di daerah i . Persamaan (1) dan

persamaan (2) menunjukkan ekspektasi pendapatan yang tinggi di daerah i akan menarik pengusaha untuk melakukan investasi. Ekspektasi pendapatan ini dapat diobservasi melalui pendapatan pada masa lalu ($t-1$). Persamaan (5) menunjukkan "gangguan" mempunyai dampak ambigu terhadap investasi. Persamaan (5) secara implisit menyatakan "gangguan" akan berdampak positif terhadap investasi⁹, tetapi peningkatannya bersifat *diminishing*. Hal ini menunjukkan "gangguan" akan memiliki nilai optimal, dan kemudian akan memiliki dampak yang negatif terhadap investasi. Berdasarkan interpretasi dari persamaan (1), (2), dan (5) maka dapat dinyatakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$INV_{i(t)} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{i(t-1)} + \beta_2 h_{i(t)} + \beta_3 (h_{i(t)})^2 + \varepsilon_{i(t)} \quad (10)$$

Data yang dipergunakan untuk mengukur investasi adalah data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang hanya tersedia sampai tingkat provinsi. Data untuk mengukur ekspektasi pendapatan pada suatu daerah digunakan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya ($t-1$). Sedangkan data tingkat korupsi digunakan data persentase suap yang dilakukan oleh pengusaha di tingkat kabupaten/kota terhadap total biaya perusahaan. Data ini diperoleh dari Kuncoro (2004) untuk 64 kabupaten/kota dari 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2004. Oleh karena data untuk variabel h terbatas hanya satu tahun maka persamaan (10) akan menjadi regresi *cross section*. Kemudian, karena data untuk PMTB hanya tersedia pada tingkat provinsi maka, data suap untuk tiap provinsi akan dirata-ratakan berdasarkan data suap kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Oleh karena itu jumlah observasi untuk regresi *cross section* persamaan (10) sebanyak 20 observasi.

Kesimpulan lain yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya adalah adanya pengaruh positif antara keragaman tingkat teknologi antardaerah dengan tingkat korupsi secara nasional. Persamaan (8) menunjukkan adanya keragaman akan menyebabkan timbulnya "gangguan" yang lebih tinggi pada daerah yang memiliki ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan pada daerah yang relatif memiliki ekspektasi pendapatan yang lebih rendah, peluang korupsi masih ada jika masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap birokratnya, seperti yang digambarkan oleh persamaan (9). Untuk menguji secara empiris persamaan (8) dan (9) maka digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$corr_{(t)} = \lambda_0 + \lambda_1 HetPDRB_{(t)} + \varepsilon_t \quad (11)$$

Data untuk mengukur tingkat korupsi di Indonesia menggunakan data *economic freedom index* yang tersedia dari tahun 1995-2007¹⁰. Indeks ini menggambarkan kebebasan dalam melakukan bisnis, perdagangan, investasi, keuangan dan kepemilikan (*property right*). Dalam indeks ini juga menggambarkan kebebasan kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter dari kepentingan golongan birokrat tertentu. Indeks ini juga menggambarkan kebebasan dari korupsi oleh pemerintah terhadap kekayaan negara. Indeks ini memiliki nilai dari 0 sampai 100, dengan nilai mendekati 0 adalah negara dengan tingkat kebebasan yang rendah (korupsi tinggi), dan nilai mendekati 100 adalah negara dengan tingkat kebebasan yang tinggi (korupsi rendah).

Variabel $HetPDRB_t$ menunjukkan keragaman teknologi antarkabupaten/kota di Indonesia. Data keragaman teknologi ($HetPDRB$) diperoleh dari kuadrat jumlah perbedaan $PDRB_{it}$ dengan rata-

⁹ Kaufmann (2006) menyatakan suap yang dilakukan oleh para pengusaha adalah untuk memperlancar jalannya bisnis, dan tidak ada nilai tambah sektor produktif yang hilang dari perekonomian.

¹⁰ Data ini dapat diakses pada www.heritage.org.

rata $PDRB_{it}$. Yang dimaksud $PDRB_{it}$ adalah kabupaten/kota yang digunakan sebagai sampel pada data suap persamaan (10) pada tahun t , atau

$$HetPDRB_t = \sum_{i=1}^{64} (PDRB_{it} - \overline{PDRB_{it}})^2 \quad (12)$$

Nilai $HetPDRB_t$ yang meningkat menunjukkan terjadi peningkatan keragaman (kesenjangan) teknologi antardaerah di Indonesia. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa nilai variabel $corr_t$ menunjukkan nilai yang lebih rendah untuk korupsi yang lebih tinggi. Sehingga berdasarkan persamaan (8) dan (9) tanda dari koefisien λ_1 adalah negatif, yang menunjukkan hubungan positif antara keragaman teknologi antardaerah dengan tingkat korupsi nasional. Karena keterbatasan ketersediaan data jumlah observasi untuk regresi *time series* persamaan (11) sebanyak 9 observasi dari tahun 1995 sampai tahun 2004.

HASIL ESTIMASI

Dampak Potensi Daerah dan "Gangguan" terhadap Investasi

Estimasi pertama dilakukan terhadap persamaan (10) untuk membuktikan persamaan (1), (2), dan (5). Estimasi persamaan (10) menggunakan metode OLS yang hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Dengan menggunakan *White's Heteroscedasticity test* hasil estimasi OLS menunjukkan adanya heteroskedastisitas (varian dari error yang tidak konstan). Perilaku *Heteroscedasticity* ini dapat terjadi karena daerah dengan PDRB yang lebih tinggi akan memiliki varian variabel gangguan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah dengan PDRB rendah. Variabel gangguan tersebut dapat berupa tingkat "gangguan" oleh para birokrat terhadap para investor.

Dengan adanya varian yang tidak konstan maka estimasi menjadi tidak efisien, dan akan menyebabkan keputusan menerima H_0 yang salah. Oleh karena itu dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode GLS. Karena nilai dari varian tidak diketahui maka digunakan prosedur *White's procedure* atau *robust standard error*. Hasil estimasi GLS menunjukkan ekspektasi pendapatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap investasi. Peningkatan satu triliun rupiah pendapatan pada tahun $(t-1)$ akan meningkatkan investasi sebesar Rp0,24 triliun pada tahun t . Sedangkan variabel "gangguan", h dan h^2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat investasi. Nilai R^2 estimasi OLS maupun GLS memberikan nilai yang sama dan sangat tinggi yaitu 0,84. Dengan tidak signifikannya variabel "gangguan" maka ekspektasi pendapatan mempengaruhi sebesar 88 persen variasi dari investasi. Uji *Likelihood Ratio* menunjukkan adanya *redundant variables* (h dan h^2) dengan uji F menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga variabel h dan h^2 dibenarkan untuk dihilangkan.

Variabel h dan h^2 adalah variabel yang sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena variabel h dan h^2 tidak signifikan secara statistik maka perilaku "gangguan" tidak didukung oleh data. Diduga terjadi bias pada pemilihan data di mana data PMTB dan PDRB adalah data secara agregat yang menunjukkan perilaku seluruh pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi yang tidak menghadapi "gangguan" oleh birokrat atau tidak memerlukan ijin usaha dalam menjalankan bisnisnya (termasuk didalamnya sektor pemerintah). Sedangkan data variabel h dan h^2 diperoleh dari persentase suap terhadap biaya total perusahaan yang memerlukan ijin usaha dan harus berhadapan dengan birokrat dalam menjalankan bisnisnya.

Tabel 1. Estimasi Terhadap Investasi

	OLS	GLS (Robust standard error)	GLS (Robust standard error)
<i>Constanta</i>	-13.54013 (16.85418)	-13.54013 (12.41654)	-1.890167 (2.153310)
$GDP_{i(t-1)}$	0.243584 (0.026971)***	0.243584 (0.056781)***	0.245566 (0.056866)***
h_i	1.533771 (2.706194)	1.533771 (1.565705)	
h_i^2	-0.040150 (0.101552)	-0.040150 (0.051430)	
Jumlah Observasi	20	20	20
R^2	0.844768	0.844768	0.836094
<i>F-statistic</i>	29.02385***	29.02385***	91.81876***
White's Heteroscedasticity Test:			
<i>F-statistic</i>	13.23184***		
<i>n.R²</i>	16.50695***		
Likelihood Ratio Test:			
<i>F-statistic</i>		0.447044	0.447044
<i>Log Likelihood</i>		1.087501	1.087501

***): signifikan pada 1 persen

Dampak Keragaman Potensi Daerah terhadap Tingkat Korupsi Nasional

Estimasi dengan menggunakan persamaan (11) dengan menggunakan metode OLS menunjukkan nilai koefisien λ_1 adalah $-0,735$. Tanda dari koefisien λ_1 sesuai dengan kerangka berfikir pada bagian model dan metodologi. Koefisien λ_1 menyatakan jika keragaman (ketimpangan) meningkat sebesar satu triliun rupiah maka nilai indeks kebebasan akan turun seberat $0,735$ satuan. Hasil ini menunjukkan keragaman (ketimpangan) antardaerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi nasional. Nilai statistik Durbin-Watson adalah $1,399$, sedangkan nilai d_L dan d_U dengan $\alpha = 5$ persen, $n = 9$, dan $k' = 1$ masing-masing adalah $0,824$ dan $1,320$. Nilai statistik Durbin-Watson berada pada daerah terima H_0 , atau tidak terjadi autokorelasi. Nilai R^2 adalah $0,906$, nilai sangat tinggi yang menyatakan bahwa $90,6$ persen variasi pada nilai indeks kebebasan dipengaruhi oleh keragaman PDRB antarkabupaten/kota sampel.

KESIMPULAN

Otonomi daerah telah menyerahkan wewenang kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah masing-masing demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini telah dibuat model bagaimana dampak adanya keunggulan teknologi atau potensi yang dimiliki satu daerah menjadi daya tarik untuk melakukan investasi. Adanya "gangguan" oleh birokrat di daerah tidak langsung menyebabkan para investor untuk meninggalkan daerah tersebut atau membatalkan rencana investasinya. Investor akan tetap

menjalankan usahanya sepanjang nilai tambah dari sektor produktif masih lebih besar dari biaya suap. Secara statistik model ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Minimnya ketersediaan data yang relevan membuat model tidak dapat didukung oleh data.

Keragaman teknologi atau potensi daerah menyebabkan daerah dengan potensi lebih tinggi memiliki daya tawar dalam menentukan "gangguan" terhadap investor. Daerah dengan potensi lebih tinggi dapat menetapkan "gangguan" yang lebih tinggi tanpa harus kehilangan investor. Sedangkan daerah dengan potensi rendah, para birokratnya masih dapat melakukan korupsi dengan asumsi masyarakatnya tidak dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan mereka akan pelayanan publik yang pantas. Keragaman potensi daerah ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Secara statistik model ini didukung oleh data.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisman, R., & Roberta, G. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. *Journal of Public Economic*, 83, 325-345.
- Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2004). Corruption in Indonesia. *w 10674*.
- Kaufmann, D. (2006). *Myths and Realities of Governance and Corruption*. World Bank Report, World Bank .
- Kuncoro, A. (2004). Bribery in Indonesia: Some Evidence from Micro-Level Data. 40 (3), 329-354.
- Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2006). *Freakonomics: a Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything*. London: Penguin Books Ltd.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110 (3), 681-712.
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. 10 (2), 201-220.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 108 (3), 599-617.
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. Massachusetts: MIT Press.